

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR DALAM PERBAIKAN JALAN RUSAK  
PERSPAKTIF FIQH SIYA<SAH**

**(Studi Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**RAHMANIYA**

**Npm : 1621020182**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siya>sah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVRSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2020M**

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR DALAM PERBAIKAN JALAN RUSAK  
PERSPAKTIF FIQH SIYA<SAH**

**(Studi Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**RAHMANIYA**

**Npm : 1621020182**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siya>sah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I DR.H.Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**Pembimbing II Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVRSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2020**

## ABSTRAK

Jalan merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk mengembangkan kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Jalan menghubungkan satu daerah ke daerah yang lainnya, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Peran jalan juga sangat penting dalam bidang kesehatan. Jalan yang rusak juga dapat meningkatkan terjadinya rawan kecelakaan, apa lagi saat hujan turun saat jalan rusak yang berlubang digenangi air maka pengguna jalan tidak dapat melihat jalan yang berlubang itu. Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana semestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur? Dan Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?. Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada responden. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh penulis yaitu melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. penelitian data dan informasi bersumber dari lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang rusak parah memperlihatkan kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah. Yang dalam hal ini pemerintah daerah ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pemerintah yang berwenang dalam hal pemeliharaan jalan. Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memang tidak bisa semua diperbaiki ataupun dipelihara karena melihat dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah hanya untuk beberapa jalan yang diputuskan dan di prioritaskan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang harus diperbaiki dan dipelihara. Pemerintah dalam hal *al-sult{ah al-tanfi>>z}/iyyah* sebagai pelaksana ketetapan hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang (*Siya>sah Dustu>riyyah* ). Berbicara tentang peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak Al-Quran membicarakan tentang amanat yang mana pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Dalam Islam juga diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepadanya dan harus berlaku adil dalam menetapkan hukum.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmaniya

NPM : 1621020182

Program Studi : *Siyāṣah Syar'iyah*

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh *Siyāṣah* (Studi Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Mei 2020

Penulis



NPM. 1621020182





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**SURAT PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudari :

Nama : Rahmaniya

NPM : 1621020182

Program Studi : Siyāsah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam  
Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa  
Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  
Lampung Timur).

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahakan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**DR.H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.**

**Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**NIP. 197403072000121000**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyāsah Syar'iyah**

**Frenki, M.Si**

**NIP.198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).”**

**Di susun oleh Rahmaniya, NPM : 1621020182, Program Studi Siyasah Syar'iyah. Telah di ujikan dalm sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 7 September 2020.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Frenki, M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

**Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** (.....)

**Penguji Pendamping I: DR. H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A.** (.....)

**Penguji Pendamping II: Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Jr. H. Khairuddin, M.H**

196210221993031002



## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*” (QS.Al-Anfa>l [8] :27)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur berkat rahmat dan hidayah dari Allah swt. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi yang sederhana namun penuh perjuangan ini kepada :

1. Ayahanda Haryadi dan Ibunda Agustina yang selalu melimpahkan do'a di dalam ibadahmu dan selalu mendukung penuh, menasehati serta menyemangati penulis dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Suryani, Abang Sopiyan dan Abang Heri Legar, Adik Dahlia, Keponakan Andri Pratama, Annisa Uwardatul Jannah, Ridho Saputra Pratama, Cahaya Elina Putri dan Reisyia Kurnia Putri dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Diah Kurniawati, Raden Ayu Kartini, Liani Putri, Inas Samalia Lestari, Iis Nurdayanti dan Dicky Kurniawan yang selalu menemani, menyemangati, memotivasi serta mendukung dalam menempuh hingga menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).
4. Teman-teman mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2016, terkhusus untuk kelas D Jurusan Siyāsah Syar'iyah yang telah bersama-sama menempuh pendidikan serta menimba ilmu.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sebagai tempat yang tidak dapat penulis lupakan dalam menimba ilmu pengetahuan serta pengamalannya.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rahmaniya, dilahirkan di Labuhan Maringgai pada tanggal 11 Februari 1998, Anak ke empat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Haryadi dan Ibu Agustina Pendidikan di mulai dari Taman Kanak-Kanak pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004, melanjutkan ke SD Negeri 2 Labuhan Maringgai pada tahun 2004 dan selesai tahun 2010, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai dan selesai tahun 2012, melanjutkan ke SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai dan selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan mengambil Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iiyyah*) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 09 Mei 2020  
Yang Membuat,

Rahmaniya

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyāṣah (Studi Di Jalan Kuala Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).” Dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, parasahabat, dan pengikut-pengikutnya yang inshaallah mendapatkan syafa’at di hariakhir, aamiin. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan semua pihak. Oleh karena itu, tidak lupa dihaturkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyāṣah Syar’iyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I dan bapak Fathul Mu’in, S.H.I.,M.H.I. selaku dosen pembimbing II.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Signifikan Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian.....	12

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Daerah .....	19
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	19
2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	22
3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	24
4. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah .....	27
5. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	28
B. Infrastruktur Jalan .....	31
1. Klasifikasi Jalan .....	31
2. Peran Jalan.....	34
3. Tujuan Penyelenggaraan Jalan .....	34
4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Jalan Rusak .....	35
C. Fiqh Siya>sah .....	38
1. Pengertian Fiqh Siya>sah.....	38
2. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah.....	40
3. Prinsip-Prinsip Siya>sah .....	42
D. Tinjauan Pustaka .....	50

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur .....	54
1. Sejarah Desa Muara Gading Mas .....	54
2. Struktur Desa Muara Gading Mas .....	55
3. Letak Geografis Muara Gading Mas .....	57
4. Kondisi Demografis Muara Gading Mas.....	58
5. Sarana Infrastruktur Jalan.....	61
B. Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai .....	63

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

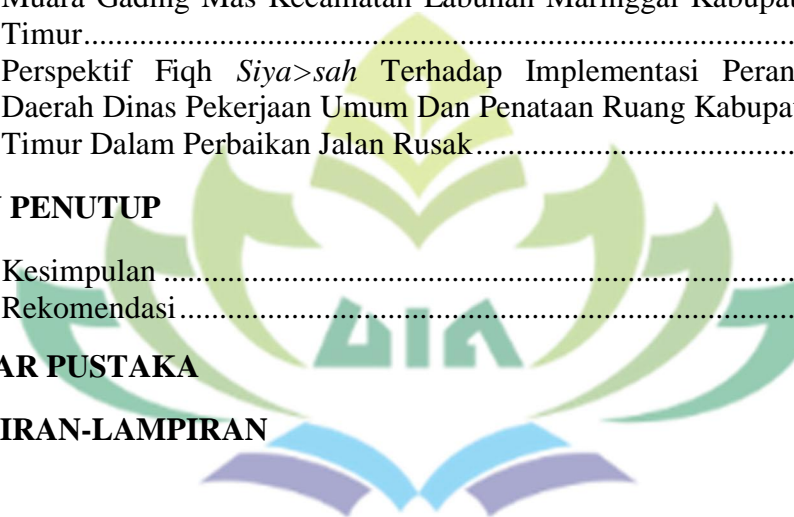
A. Analisis Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	73
B. Perspektif Fiqh <i>Siya&gt;sah</i> Terhadap Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi.....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Daftar Kepala Desa Dari Tahun Ke Tahun .....	55
2. Tabel 2 Perangkat Desa .....	55
3. Tabel 3 Batas Wilayah .....	57
4. Tabel 4 Orbitrasi.....	57
5. Tabel 5 Data Penduduk .....	58
6. Tabel 6 Pendidikan.....	59
7. Tabel 7 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat .....	60



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Lampiran 2 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten lampung Timur

Lampiran 3 Surat Izin Riset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten lampung Timur

Lampiran 4 Surat Izin Riset dari Kepala Desa Muara Gading Mas

Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 6 Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Foto Dokumentasi

Lampiran 9 Surat Bukti Tidak Plagiat





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan judul. Sebelum peneliti mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul.

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh *Siya>sah* (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)". Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut.

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk, hal yang telah disepakati.<sup>1</sup>

Peran yang menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain, proses, cara perbuatan memerankan.<sup>2</sup>

Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lainnya untuk dan atas nama

---

<sup>1</sup>Depatemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 854.

negara.<sup>3</sup> Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah dalam hal pemeliharaan atau perbaikan jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dimaksud disini yaitu PUPR Kabupaten Lampung Timur.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan-jalan kabel.<sup>5</sup>

Secara bahasa pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Sedangkan *siya>sah* berarti mengatur mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Fiqh *siya>sah* adalah bagian

---

<sup>3</sup> M. Iwan Satriawan. dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.13.

<sup>4</sup>Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pasal 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 Ayat 4.



dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.<sup>6</sup>

Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan seperti larangan-larangan, hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh kepala negara atau suatu badan, oragainsi.<sup>7</sup>

Labuhan Maringgai adalah nama sebuah kecamatan yang merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri dari 11 desa.

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dan ibu kotanya adalah sukdana.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah uraian tentang bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak berdasarkan fiqh siyasah di Jalan Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas judul penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Karena melihat jalan yang rusak parah yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, waktu tempuh yang lama, kemacetan dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya>sah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.3.

<sup>7</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 942.

lain-lain maka dalam praktiknya peran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, perlu diteliti bagaimana pemerintah daerah dalam menjalannya perannya memperbaiki perasarana transportasi jalan.

- b. Karena untuk meninjau peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak berdasarkan aturan yang ada dengan kaca mata fiqh *siya>sah*.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa data dan literatur yang mendukung penelitian ini cukup tersedia, oleh karena itu penulis yakin skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan jurusan *Siya>sah* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan Islam tidak hanya membahas mengenai peribadahan tetapi juga membahas ketatanegaraan. Fiqh *siya>sah* merupakan Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>8</sup> Dalam Islam juga dikenal *siya>sah*

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya>sah*, h.4.

*Syar'iyah* yang diartikan dengan ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>9</sup>

Masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif dan masalah-masalah dalam negeri maupun internasional lainnya.

Kajian fiqh *siya>sah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siya>sah dustu>riyyah* (peraturan perundang-undangan), *siya>sah ma>liyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siya>sah dawliyyah* (hubungan internasional). Dalam siyasah dikenal juga pembagian kekuasaan yaitu *al-sult}ah al-tanfi>z}iyyah* (lembaga eksekutif), *al-sult}ah al-tasri>'iyyah* (lembaga legislatif), dan *al-sult}ah al-qad}a>'iyyah* (lembaga yudikatif).

Tata pemerintahan di Indonesia mempunyai landasan hukum dalam menjalankan pemerintahannya yaitu konstitusi atau UUD 1945 sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia menganut asas otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>10</sup> Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

---

<sup>9</sup>*Ibid.* h.5.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: P T Raja Grafindo Persada, 2012), h. 328.



untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>11</sup>

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang penguasa pada bawahannya sendiri.<sup>12</sup>

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>13</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pelayanan publik yang efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah telah menciptakan paradigma yang berdampak pada pelimpahan wewenang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 329.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 332.

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h. 142.

ditingkat daerah, dalam kata ini jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi yang mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah.

Pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Dalam Islam juga diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepadanya yaitu pada QS. Al-Anfa>l [8] ayat 27 diterangkan bahwa:<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*” (QS.Al-Anfa>l [8] :27)

Ayat tersebut menerangkan bahwa apapun yang telah diamanatkan kepada kita harus dijaga dan dipelihara karena kita dipercaya terhadap amanat-amanat yang telah diberikan kepada kita. Begitu pun dengan pemerintah yang sudah diberi amanat oleh negara melalui undang-undang. Sudah seharusnya pemerintah menjalankan amanat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan kepadanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016) h.180.

desa.<sup>15</sup> Jalan yang berada di daerah Kuala desa Muara Gading Mas kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur merupakan kewenangan pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan jalan. Dan kewenangan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.<sup>17</sup>

Jalan merupakan infrastuktur yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk mengembangkan kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Jalan menghubungkan satu daerah ke daerah yang lainnya, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat 1.

<sup>16</sup>Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pasal 3.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 24.

merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Peran jalan juga sangat penting dalam bidang kesehatan, bayangkan saja jika ada seorang ibu hamil yang akan segera melahirkan atau pasien dengan kondisi darurat sulit menjangkau rumah sakit akibat jalan yang rusak, maka kematian adalah resiko terburuk yang harus diterima. Jalan yang rusak juga dapat meningkatkan terjadinya rawan kecelakaan, apa lagi saat hujan turun saat jalan rusak yang berlubang digenangi air maka pengguna jalan tidak dapat melihat jalan yang berlubang itu. Seperti yang terjadi di jalan Kuala Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai banyak sekali jalan berlubang-lubang, dan juga begelombang. Jalan Kuala desa Muara Gading Mas merupakan sarana transportasi bagi masyarakat setempat dari gudang lelang dan pasar menuju desa-desa lain untuk mendistribusikan hasil laut kepada masyarakat. Jalan Kuala juga merupakan jalan menuju pantai yang digunakan wisatawan.

Jalan yang rusak dan berlubang di daerah Kuala desa Muara Gading Mas itu menjadi salah satu penghambat sarana transportasi bagi masyarakat setempat, wisatawan dan pedagang yang mendistribusikan hasil laut di daerah tersebut. Jarak jalan yang rusak di daerah Kuala Desa Muara Gading Mas berkisaran kurang lebih 1.250 M. Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana semestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan.



#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah peran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di Jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana perspektif fiqh *siyasah* terhadap peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui perspektif fiqh *siya>sah* terhadap Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

#### **G. Signifikan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke Islaman, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Alasannya karena penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan peran pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak yang menjadi wewenangnya berdasarkan riset yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna akan lebih ditekankan dalam penelitian *kualitatif*. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan langsung pada responden.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.

#### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini, penelitian ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan

---

<sup>18</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 10

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

rusak berdasarkan di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

### 3. Sumber Data

Penulis menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini, sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>20</sup> Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini diantaranya riset lapangan (*field research*), yaitu data tentang implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya.<sup>21</sup> Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari Al-

---

<sup>20</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>21</sup> Louis Gootschik, *Understanding History, Apiori of Historycal* terjemahan Nugroho Nota Sumanto, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), h. 98.



Qur'an, Hadist, kitab-kitab Fiqih, buku-buku, artikel, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Sampel

Metode pengumpulan data menggunakan metode sampling, yang mana metode sampling yaitu metode dengan jalan mencatat sebagian kecil dari populasi atau dengan kata lain mencatat sampel saja.<sup>22</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu 1 orang dari bidang pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 1 orang perangkat desa dan 10 masyarakat pengguna jalan di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.<sup>23</sup> Menurut S Nasution wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh

---

<sup>22</sup> J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), h.37.

<sup>23</sup> Arikunto, Sarmini dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 83.

informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>24</sup> Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak berstruktur cara ini dipakai supaya lebih memudahkan dalam mencapai suatu tujuan.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemerintah yang berwenang memperbaiki jalan dan masyarakat pengguna jalan di daerah jalan yang rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai.

c. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan *empiris*.<sup>26</sup> Maka dalam penelitian ini dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Seperti sejak kapan jalan tersebut rusak dan sudah berpakali diperbaiki.

---

<sup>24</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, 62

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Penelitian Riserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h. 115.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 114

## 5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.<sup>27</sup> Yang terkait dengan penelitian implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## 6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>27</sup>*Ibid*,h. 115

b. Sistematis data (*systematizing*)

Sistematis adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian, yaitu implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif Fiqh Siyasah yang akan didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang implementasi peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi



yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai peran pemerintah terhadap perbaikan jalajan rusak. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai implementasi peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **E. Pemerintah Daerah**

##### **6. Pengertian Pemerintah Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia menganut asas otonomi daerah yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.<sup>28</sup> Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintah daerah pasca kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah terfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang

---

<sup>28</sup> UUD 1945, Pasal 18 Angka (2).

demokratis. Setelah mengalami beberapa perubahan lahirilah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hal-hal penting yang ada pada undang-undang ini adalah kembalinya dominasi eksekutif dan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kini undang-undang tersebut telah diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Utrecht menerangkan bahwa setidaknya ada tiga pengertian pemerintah yaitu *Pertama*, pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau kelengkapan negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; *kedua*, pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah negara. Misalnya, presiden, raja, Badan Uni Sovyet, dan Yang Dipertuan Agungan di Malaysia; *ketiga*, pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan menteri-mentrinya, yang berarti organ eksekutif.<sup>29</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>29</sup> Deddy Ismatullah dan Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.73-74.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>30</sup> Hubungan pemerintah daerah dengan DPR merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintah daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah.

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.

Menurut undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti pemda, kepala daerah serta DPRD.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 2 dan 3.

<sup>31</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h. 143.



## **7. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan daerah otonomi daerah terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap tercermin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kawasan kehutanan, kawasan perkotaan

baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dikemungkinan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>32</sup>

Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

---

<sup>32</sup> A. Ubaidillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta Pramedia Grup, 2016), h.195-196.

- a. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara
- b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang telah diberikan
- c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa
- d. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
- e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.<sup>33</sup>

Untuk mewujudkan semua prinsip-prinsip tersebut harus ada keserasian hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

#### **8. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>34</sup>

##### **a. Desentralisasi**

Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Desentralisasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang pada

---

<sup>33</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h.149.

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta: P T Raja Grafindo Persada, 2012), h. 328.

badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>35</sup>

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberi wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>36</sup> Demikian urusan wewenang dan tanggung jawab yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah baik itu mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun dari segi-segi biayanya dan perangkat pelaksanaan adalah daerah itu sendiri.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggungjawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun biayanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.<sup>37</sup>

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi juga diartikan sebagai pelimpahan

---

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 329.

<sup>36</sup> Zuhraini, *Tata Negara Indonesia*, (Depok: Ijaba Pers, 2016), h. 196.

<sup>37</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h. 142.

wewenang penguasa pada bawahannya sendiri.<sup>38</sup> Dekonsentrasi adalah semua kegiatan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada badan-badan lain atau merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>39</sup>

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.<sup>40</sup> Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.

---

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: P T Raja Grafindo Persada, 2012), h. 332.

<sup>39</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 142.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 11.



## 9. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menerangkan bahwa penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a.

---

<sup>41</sup> Sarman dan M Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h.103-104.

tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.<sup>42</sup>

## **10. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk mengambil keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain/badan lain.<sup>43</sup> Sedangkan dari segi ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara, pengertian kewenangan yang diantaranya adalah menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan

---

<sup>42</sup>Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat 1,2 dan 3.

<sup>43</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar : Pustaka Refleksi, 2010), h.3.

formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>44</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat pemerintahan mempunyai landasan hukum atau adanya asas legalitas.

Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.<sup>45</sup>

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>46</sup> Pengertian kewenangan atau wewenang yang

---

<sup>44</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981). Hlm.231.

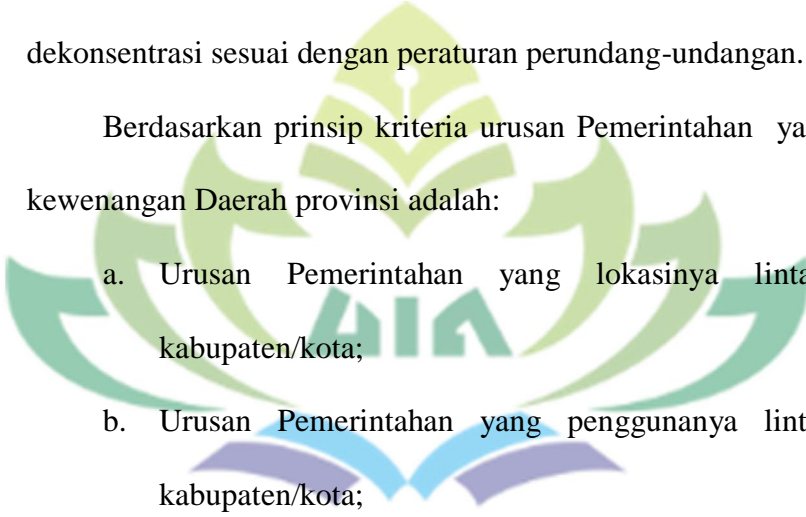
<sup>45</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h. 92.

<sup>46</sup> Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h.65.

berasal dari hukum organisasi pemerintahan, dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan.

Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- 
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.<sup>47</sup>

## **I. Infrastruktur Jalan**

### **1. Klasifikasi Jalan**

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Jalan umum dikelompokkan menurut sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yaitu :

- a. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , Pasal 13 ayat 3 dan 4.



menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

- b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.<sup>48</sup>

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yaitu:

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.<sup>49</sup>

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yaitu :

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 7 Ayat 2 dan 3.

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 8 ayat 2, 3, 4 dan 5.

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>50</sup>

Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 9 ayat 2,3,4,5 dan 6.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

## **2. Peran Jalan**

Peran jalan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagai berikut :

- a. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia<sup>51</sup>

## **3. Tujuan Penyelenggaraan Jalan**

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 5.

- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. Mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka.<sup>52</sup>

#### **4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Jalan Rusak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 angka (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.<sup>53</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 15 ayat(1) menerangkan bahwa wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Dan ayat(2) menerangkan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan,

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 3.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,Pasal 12 ayat 2.

pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.<sup>54</sup> Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.<sup>55</sup>

Jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi yang mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang mana kewenangan dalam perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24 menerangkan bahwa penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.<sup>56</sup>

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggaran jalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 238 menerangkan bahwa (1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan. (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.<sup>57</sup>

Kewajiban penyelenggaran jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam

---

<sup>54</sup>Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 15 ayat 1 dan 2.

<sup>55</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat 1.

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 24.

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 238 ayat 1 dan 2



penggunaan jalan saja, melainkan termasuk pula dalam memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;
- c Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakaryaan;
- d Pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan kabupaten, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;

---

<sup>58</sup>Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pasal 3.

- e Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya serta keciptakaryaannya;
- f Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan serta bangunan;
- g Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan, jembatan, dan keciptakaryaannya;
- h Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran;
- i Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.<sup>59</sup>

## **J. Fiqh *Siya>sah***

### **4. Pengertian Fiqh *Siya>sah***

Secara bahasa pengertian fiqh adalah pemahaman yang mendalam. Imam al-Thirmizi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat alamiah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci.<sup>60</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga diamalkan oleh umat Islam.

---

<sup>59</sup>Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pasal 4.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siya>sah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2014),h.2-3.

Kata *siya>sah* berasal dari kata *asa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian *siya>sah* secara bahasa mengisyaratkan bahwa tujuan *siya>sah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>61</sup> Disamping itu *siya>sah* juga berarti politik, dan penetapan suatu bentuk kebijakan.

Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siya>sah* adalah pengeturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa fiqh *Siya>sah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh *siya>sah* ulama menggali hukum-hukum Islam.

Fiqh *siya>sah* adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.<sup>63</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh *siya>sah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana

---

<sup>61</sup> *Ibid*.h.3.

<sup>62</sup> *Ibid*.h.4.

<sup>63</sup> J Sayuthi Pulung, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), h.29.

kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

## 5. Ruang Lingkup Fiqh *Siya>sah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh *siya>sah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siya>sah Dustu>riyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siya>sah Tasyri>'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siya>sah Qad}a>'yyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siya>sah Ma>liyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siya>sah Ida>riyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siya>sah Dawliyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siya>sah Tanfi>z}iyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siya>sah H>{arbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan)<sup>64</sup>

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh *siya>sah* dapat disederhanakan menjadi *pertama*, politik perundang-undangan (*siya>sah dustu>riyyah*). Bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (*tasyri>'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qad}a>'yyah*)

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siya>sah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2014),h. 15.

oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*ida>riyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

*Kedua*, politik luar negeri (*siya>sah dawliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim atau disebut juga hubungan internasional.

*Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siya>sah ma>liyyah*) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional dan kepentingan/hak-hak publik dan perbankan.<sup>65</sup> Objek bahasan fiqh *siya>sah* secara garis besar adalah: a) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dan mewujudkan kemaslahatan umat; b) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>66</sup>

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fiqh *siya>sah* atas beberapa bagian:

g. Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah*

---

<sup>65</sup>*Ibid.* h. 15-16.

<sup>66</sup>J Sayuthi Pulung, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), h. 31.



mengatakan bahwsannya ruang lingkup fikih *siya>sah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*siya>sah dustu>riyyah*), politik moneter (*siya>sah ma>liyyah*), politik peradilan (*siya>sah qad}a>'iyyah*), politik peperangan (*siya>sah h}arbiyyah*), dan politik administrsasi (*siya>sah ida>riyyah*).

- h. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya membagi fiqh *siya>sah* atas tiga bagian yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.
- i. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.<sup>67</sup>

Dalam kajian fiqh *siya>sah* pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga yaitu *pertama, al-sult}ah al-tasyri>'iyyah* (legislatif) yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. *Kedua, al-sult}ah al-tanfi>z}iyyah* (eksekutif) yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam pelaksana ketetapan hukum. *Ketiga, al-sult}ah al-qad}a>'iyyah* (yudikatif) yaitu kekuasaaan pemerintah Islam dalam pengawasan ketetapan hukum.

## 6. Prinsip-prinsip *Siya>sah*

- a. Prinsip Dari Al-Quran<sup>68</sup>

### 1) Kedudukan Manusia diatas Bumi

---

<sup>67</sup>Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial antara konsep dan implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), h.576.

<sup>68</sup> J Sayuthi Pulung, *Fikih Siya>sah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), h.5.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...<sup>69</sup>

Artinya : “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS.Al-Baqarah [2] : 30)<sup>69</sup>

## 2) Prinsip Manusia sebagai yang Satu

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً....

Artinya: “ manusia itu adalah umat yang satu.” (QS. Al-Baqarah [2] : 213)<sup>70</sup>. Bahwa manusia dari zaman nabi Adam sampai zaman nabi Nuh beriman kepada Allah, kemudian mereka mulai berselisih. Maka Allah mengutus para Nabi untuk memberi petunjuk bagi manusia, agar mereka dapat memberi keputusan pada apa yang diperselisihkan manusia. manusia itu adalah satu umat yang bersepakat atas jalan yang benar, yaitu keimanan kepada Allah.

## 3) Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>71</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”(QS.An-Nisa>’ [4] : 58).<sup>71</sup>

## 4) Prinsip Kepemimpinan

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h.6.

<sup>70</sup>*Ibid.* h.33.

<sup>71</sup>*Ibid.* h.87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ص</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa>' [4] : 59).<sup>72</sup>

5) Prinsip Musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syu>ra' [42] : 38).<sup>73</sup>

6) Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS.Al-Hujura>t [49] : 10).

7) Prinsip Persamaan

---

<sup>72</sup>Ibid. h.87.

<sup>73</sup>Ibid. h. 487.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(QS. An-Nisa’ [4] : 1).<sup>74</sup>

8) Prinsip Hidup Bertetangga/Hubungan Antar-Negara  
Bertetangga

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ...

Artinya: “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh...”(QS. An-Nisa’ [4] : 36).<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Ibid. h.77.

<sup>75</sup>Ibid. h.84.

9) Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang Lemah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Ma>idah [5] : 2).<sup>76</sup>

10) Prinsip Perdamaian dan Peperangan/Hubungan Internasional

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. (QS. Al-Anfa>l [8] : 61).<sup>77</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artiny: “ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(QS. Al-Baqarah [2] : 190).<sup>78</sup>

11) Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

---

<sup>76</sup>Ibid. h.106.

<sup>77</sup>Ibid. h.184.

<sup>78</sup>Ibid. h.29.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٧٩

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2] : 275.)<sup>79</sup>

## 12) Prinsip Administrasi dalam Perikatan/Muamalah

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ٨٠  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ....

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”(QS. Al-Baqarah [2] : 283)<sup>80</sup>

## 13) Prinsip Membela Negara

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا  
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ٨١ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

Artinya: “jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat

<sup>79</sup>Ibid. h.47.

<sup>80</sup>Ibid. h. 49.



memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(QS. At-Tawbah [9] : 39)<sup>81</sup>

#### 14) Prinsip Hak Untuk Hidup

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي  
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’ [17]: 33)

#### 15) Prinsip Amal Makruf dan Nahi Munkar

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...

Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali’Imran [3] : 110).<sup>82</sup>

#### 16) Prinsip dalam menetapkan Para Pejabat atau Pelaksana Suatu Urusan

---

<sup>81</sup>Ibid. h.193.

<sup>82</sup>Ibid. h.51.

## إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوَى الْأَمِينُ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(QS. Al- Qhasash [28]: 26).<sup>83</sup>

### b. Prinsip Dari Hadis

#### 1) Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra., berkata : Rasulullah saw, bersabda : “Apabila ada tiga orang bepergian hendaklah mereka memilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin rombongan” (H.R Abu Dawud).<sup>84</sup>

#### 2) Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “ Nabi saw bersabda, ‘setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pemimpin Negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab. Orang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab. Dan, orang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016) h.388.

<sup>84</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) h.96

pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya.”(HR. Bukhari)<sup>85</sup>

### 3) Prinsip Ketaatan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, Bahwa beliau bersabda, “Siapa saja yang taat padaku, maka sungguh ia taat kepada Allah, siapa saja yang durhaka kepadaku, maka sungguh ia durhaka kepada Allah, siapa saja yang patuh kepada penguasa yang aku tunjuk, maka sungguh ia patuh kepadaku, dan siapa saja yang durhaka kepada penguasa yang aku tunjuk, maka sungguh ia durhaka kepadaku” (HR.Muslim).<sup>86</sup>

## K. Tinjauan Pustaka

Tinjauan terdahulu merupakan referensi sebagai tolak ukur dan acuan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu membantu untuk mempermudah penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun penelitian ini dari segi teori maupun konsep. Perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada permasalahannya. Dalam penelitian ini bagaimana implementasi dari peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak. Sedangkan dalam dua penelitian lain yaitu :

### 1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Wahyu Supriyanto

---

<sup>85</sup> M. Luqman As Salafi, *Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad*, (Jakarta : Griya Ilmu, 2013) h.224-225.

<sup>86</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta :Pustaka as-Sunnah, 2008), h.877.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Supriyanto berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012. Menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tahun 2012 mengalami keterlambatan dalam pengalokasian dana anggaran.<sup>87</sup>

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tahun 2012 mengalami keterlambatan dalam pengalokasian dana anggaran. Sehingga, kebijakan pengalokasian dan pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut adanya keterlambatan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah kepada Kecamatan Gunung Sindur. Adanya indikasi yang mengisyaratkan politik anggaran yang dilakukan oknum ataupun elit politik dilembaga eksekutif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Wahyu Supriyanto adalah objeknya yaitu jalan, sedangkan perbedaannya yaitu tentang pembangunan jalan. Penelitian yang dilakukan Wahyono Supriyanto yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan

---

<sup>87</sup>Wahyu Prasetyo, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012," (Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h.58.

infrastruktur jalan, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak.

## 2. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Ade Yute Prasetyo

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Yute Prasetyo berjudul analisis dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan lingkungan di jalan Raya Gampeng, Kediri Jawa Timur. Menjelaskan bahwa dampak yang timbul terhadap pengguna jalan akibat kerusakan jalan di Kediri, Jawa Timur. Hal ini tentu berpengaruh negatif bagi pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Setelah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kerusakan jalan tersebut, lalu perlu dilakukan perencanaan perkuatan jalan lama agar dapat mengurangi dampak dari kerusakan jalan yang terjadi.<sup>88</sup>

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dampak dari kerusakan jalan yang tentu berpengaruh negatif bagi pengguna jalan dan lingkungan disekitar. Maka diperlukan perencanaan perkuatan jalan lama agar dapat mengurangi dampak yang timbul dari kerusakan jalan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Ade Yute Prasetyo adalah objeknya yaitu jalan rusak, sedangkan perbedaannya yaitu tentang dampak jalan rusak. Penelitian yang dilakukan Ade Yute Prasetyo yaitu dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan

---

<sup>88</sup>AdeYute Prasetyo, "Analisis Dampak Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna Jalan Dan Lingkungan Di Jalan Raya Gampeng, Kediri Jawa Timur"(Skripsi Program Studi Teknik Sipil: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,2017), H.2.

lingkungan di jalan raya gampeng, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak.

Kelebihan dalam skripsi ini dari dua skripsi diatas yaitu lebih menekan pada peran pemerintah dalam melakukan atau perbaikan jalan rusak. Perhatian pemerintah terhadap jalan rusak yang sudah lama tidak diperbaiki dan jalan yang berada dipinggir kabupaten.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S. d. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Atmosudirdjo, P.. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- C.S.T Kansil, C. S. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Gatara, D. I. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Gootschik, L. *Understanding History, Apiori of Historycal* terjemahan Nugroho Nota Sumanto. Jakarta: Universitas Indonesia. 1996.
- Hidjaz, K. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi. 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Huda, N. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: P T Raja Grafindo Persada. 2012.
- Indonesia, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Indroharto. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994.
- Iqba, M. *Fiqh Siya>sah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Khoiriah, M. I. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016.
- Mahfudz, S. *Fiqh Sosial antara konsep dan implementasi*. Surabaya: Khalista. 2007
- Makarao, S. d. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Nasution. *Metode Penelitian Riserch*. Bandung: Bumi Aksara. 1996.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Nawawi, I. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Phoenix, T. P. *Kamus Besar Bahsa Indonesia*. Jakarta: Puskata Phoenix. 2007.
- Pulung, J. S. *Fikih Siya>sah*. Yogyakarta: Ombak. 2014.

Supranto, J. *Metode Riset*. Jakarta.: LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1974.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intang Lampung. 2015.

Tika, M. P. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Ubaidilah, A. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Pramedia Grup. 2016.

Zuhraini. *Tata Negara Indonesia*. Depok: Ijaba Pers. 2016.

### **Al-quran dan Hadis**

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016.

M. Luqman As Salafi, *Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad*, Jakarta: Griya Ilmu, 2013.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

### **Undang-Undang**

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B. 693 /15.Sk/2013 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten.

### **Jurnal**

Irwantoni, “Peran Siyasah Syari’iyah dalam memahami nas-nas Agama”.Jurnal Al-Adalah, Vol X No. 3, Bandar Lampung :Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, 2 juni 2020.

## **Skripsi**

Wahyu Prasetyo, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dikecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012,” Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Ade Yute Prasetyo, “Analisis Dampak Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna Jalan Dan Lingkungan Di Jalan Raya Gampeng, Kediri JawaTimur” Skripsi Program Studi Teknik Sipil: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017.

## **Data Desa**

Profil Desa Muara Gading Mas Kecamatan LAbuhan Maringgai Kabupaten Lmpung Timur

Proposal Permohonan Bantuan Perbaikan/Peningkatan Jalan Raya Muara Gading Mas dan Drainase Kanan Kiri Jalan. Tahun 2017

Rencana Pemerintah Desa Perubahan (RKP-Desa Perubahan) Tahun Anggaran 2020).

## **Wawancara**

Wawancara Rismawan Hidayat dengan Rahmaniya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur, 11 Mei 2020.

Wawancara Wahyono dengan Rahmaniya, Rumah Kepala Desa, 4 Mei 2020.

Wawancara Diah Kurniawati dengan Rahmaniya, 8 mei 2020.

Wawancara Erlina dengan Rahmaniya, 8 Mei 2020.

Wawancara Iskandar dengan Rahmaniya, 8 mei 2020.

Wawancara Izwan dengan Rahmaniya, 8 Mei 2020.

Wawancara Mustofa dengan Rahmaniya, 8 Mei 2020.

Wawancara Raden Ayu dengan Rahmaniya, 8 Mei 2020.

Wawancara Sumarni dengan Rahmaniya, 8 mei 2020.

Wawancara Satiman dengan Rahmaniya, 8 mei 2020.

Wawancara Tomi dengan Rahmaniya, 8 Mei 2020.

Wawancara Warno dengan Rahmaniya, 8 Mei 2020.

## **Sumber on-line.**

“Pekab Lamtim Anggarkan 257 Milyar Untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan”  
<http://lampungtimurkab.go.id/read/1271/pemkab-lamtim-anggarkan-257-milyar-untuk-perbaikan-infrastruktur-jalan>, 28 mei 2020.

